

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENGARUH KARAKTERISTIK CEO DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN PADA
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG *LISTING* DI
BURSA EFEK TAHUN 2020-2022**



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA: KENNETH LIMINDO
NIM: 126231015**

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI AKUNTANSI**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

PENGARUH KARAKTERISTIK CEO DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG *LISTING* DI BURSA EFEK TAHUN 2020-2022

LAPORAN TUGAS AKHIR

Disusun Oleh:



Kenneth Limindo S.E.

126231015

**Disetujui Oleh:
Pembimbing**



Ivan Kanel S.E., M.Ak., MM., Ak., BKP., CPA., CA., CFI., CPFI., CPMA., CMA., ASEAN CPA., CTA., CBV., CACP., CAPM., CAPF., CDMS., CERA., CPS., CIBA., CGBA., CPRM., CRMA., CRMS., CCMA., CAMP., CPGA., CHCM., CCBP., CSR., CPHRM., CGRM., CRM., CHRM., CMIS., CIBT., CPPM

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya penyusunan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Karakteristik CEO Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan Yang *Listing* Di Bursa Efek Tahun 2020-2022**” ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Selama saya melewati penyusunan proses penyusunan penelitian ini ini saya mengalami banyak pembelajaran dan pengalaman khususnya dalam melakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Akuntansi untuk menyelesaikan Program Pendidikan Profesi Akuntansi.

Penyusunan penelitian ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir., Agustinus Purna Irawan, selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Bapak Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA., CA., CPA (Aust)., selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Dr. Jamaludin Iskak, M.Si., Akt., CPI, CA,CPA, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Ivan Kanel S.E., M.Ak., MM., Ak., BKP., CPA., CA., CFI., CPFI., CPMA., CMA., ASEAN CPA., CTA., CBV., CACP., CAPM., CAPF., CDMS., CERA., CPS., CIBA., CGBA., CPRM., CRMA., CRMS., CCMA., CAMP., CPGA., CHCM., CCBP., CSR.P., CPHRM., CGRM., CRM., CHRM., CMIS., CIBT., CPPM selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama masa studi penulis.
7. Kepada orang tua, adik, dan keluarga yang telah memberikan yang telah memberikan dukungan doa, semangat, dan harapan kepada penulis sehingga penulis untuk bersikap tekun dan gigih dalam masa penyelesaian skripsi ini.

8. Bagi teman-teman yang membantu dan memberikan dukungan selama kuliah dan proses penyusunan penelitian ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
Akhir kata, kiranya proposal penelitian saya dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca khususnya bagi para mahasiswa Universitas Tarumanagara dalam menyusun penelitian lebih lanjut di masa depan.

Jakarta, 25 Juni 2024

Kenneth Limindo S.E.

DAFTAR ISI

LAPORAN TUGAS AKHIR.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Praktis.....	6
1.4.2 Manfaat Teoritis dan Akademis.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 <i>Upper Echelons Theory</i>	7
2.1.2 <i>Agency Theory</i>	7
2.1.3 Kecurangan Laporan Keuangan.....	8
2.1.4 Karakteristik CEO.....	9
2.1.5 Kewarganegaraan CEO.....	10
2.1.6 <i>Good Corporate Governance</i>	Error! Bookmark not defined.
2.1.7 Komisaris Independen.....	11
2.1.8 Rapat Komite Audit.....	12
2.2 Penelitian Terdahulu.....	13
2.3 Kerangka Penelitian dan Pengembangan Hipotesis.....	14
2.3.1 Pengaruh Kewarganegaraan CEO terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.....	15
2.3.2 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.....	15
2.3.3 Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.....	16

BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Jenis Penelitian.....	18
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	18
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	19
3.4 Teknik Pengumpulan Data	19
3.5 Definisi Operasional.....	19
3.5.1 Variabel Dependen	19
3.5.2 Variabel Independen	21
3.6 Metode Analisis Data	22
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	22
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	22
3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1 Populasi dan Sampel Penelitian.....	26
4.2 Analisis Deskriptif Statistik	26
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	28
4.3.1 Uji Multikolinearitas	28
4.3.2 Uji Autokorelasi	29
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	29
4.3.4 Uji Normalitas.....	30
4.4 Analisis Regresi Linear Berganda	31
4.4.1 Persamaan Regresi	32
4.4.2 Koefisien Determinasi	33
4.4.3 Uji F	33
4.4.4 Uji T	34
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian.....	36
4.5.1 Pengaruh Kewarganegaraan CEO terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.....	37
4.5.2 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.....	38
4.5.3 Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.....	39

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	41
5.1 Kesimpulan	41
5.2 Implikasi Penelitian	41
5.3 Keterbatasan Penelitian	42
5.4 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi	23
Tabel 4. 1 Tabel Pemilihan Sampel Penelitian	26
Tabel 4. 2 Hasil Analisis Deskriptif Statistik.....	27
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas	28
Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi	29
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	30
Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas	31
Tabel 4. 7 Persamaan Regresi	32
Tabel 4. 8 Koefisien Determinasi	33
Tabel 4. 9 Hasil Uji F.....	34
Tabel 4. 10 Hasil uji T	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Hubungan Antara Variabel Independen dan Variabel Dependen . 14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud, melibatkan beragam cara licik dan menipu, dimana hal tersebut dirancang demi memperoleh keuntungan dari orang lain, merupakan sebuah tindakan kriminal yang tersebar di berbagai negara. Berdasarkan pengetahuan ini, *fraud* secara umum dipahami sebagai sebuah kesalahan yang disengaja, baik kesalahan internal maupun kesalahan eksternal yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian orang lain untuk mencapai tujuan tertentu (Christian & Veronica, 2022). Berdasarkan laporan dalam *Report to the Nations* (2022, p. 8-10) dari *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), di 133 negara terdapat 2.110 kasus *fraud* yang terjadi pada tahun 2021, mengakibatkan kerugian global sebesar \$3,6 miliar. Meskipun jumlah kasus kecurangan laporan keuangan relatif sedikit, namun kecurangan ini menyebabkan kerugian paling besar, mencapai \$593.000. Selain itu, pelaku tindakan *fraud* yang paling banyak menyebabkan kerugian adalah pemilik usaha atau eksekutif (ACFE, 2022, p. 44). Dalam konteks kecurangan laporan keuangan, kecerdikan dan ketidakjujuran dalam menyajikan informasi keuangan dapat merugikan banyak pihak. Kecurangan semacam ini sering kali melibatkan manipulasi data keuangan untuk menipu investor, kreditor, dan pihak terkait lainnya.

Pada tahun 2022, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami penurunan terbesar sepanjang sejarah. Hasil *Corruption Perception Index* (CPI) pada tahun tersebut telah dirilis oleh *Transparency International*. CPI adalah indikator komposit yang mengukur persepsi korupsi di sektor publik, dengan skala dari nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih), berdasarkan data dari 180 negara dan wilayah. Indonesia mendapat skor 34 dengan peringkat 110 dari 180 negara, menurun 4 poin dari tahun sebelumnya, dan merupakan skor terendah sejak 2015 (*Transparency International*, 2022). Penurunan ini menandai tingginya tingkat kecurangan yang terjadi di Indonesia, memperlihatkan perlunya tindakan untuk mengatasi masalah korupsi secara lebih efektif. Menurut survei ACFE Indonesia (2019), laporan keuangan yang terkait dengan kasus *fraud* menempati peringkat ketiga dalam jumlah kasus di Indonesia. Salah satu sektor yang terdeteksi melakukan *fraud* dalam laporan keuangan adalah sektor pertambangan. Data yang dikeluarkan

oleh ACFE Dunia tahun 2019 menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan telah terlibat dalam kecurangan laporan keuangan sebesar 5.0%, menempatkannya di peringkat ketiga dari 11 industri lainnya yang mengalami kerugian akibat *fraud* (*Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2019*).

Kasus *fraud* dalam laporan keuangan yang melibatkan perusahaan tambang di Indonesia telah menjadi fokus perhatian publik yang mendalam. Contohnya, PT Timah Tbk, sebuah perusahaan tambang yang dimiliki oleh negara, terjerat dalam kasus penipuan *financial statement* yang mencakup manipulasi laporan keuangan laba rugi dan neraca dari tahun 2013 hingga 2017. Kejadian ini mengakibatkan pemecatan sejumlah pejabat tinggi, termasuk mantan Direktur Jenderal Thoeng Tjendrakusuma. Dampaknya terasa secara signifikan, terutama pada semester pertama tahun 2015, ketika terjadi peningkatan utang dan kerugian operasional yang berujung pada pembekuan perdagangan saham oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kritik terhadap tata kelola dan transparansi manajemen yang diterima perusahaan ini menyoroti urgensi pelaporan keuangan yang akurat dan implementasi tata kelola yang efektif di perusahaan publik. Dampaknya tidak hanya berhenti pada hilangnya kepercayaan investor, tetapi juga berpotensi menimbulkan tindakan hukum (Soda, 2016). Di sisi lain, perusahaan tambang nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, juga terlibat dalam kecurangan laporan keuangan dengan mencatat transaksi fiktif dan menginflasi nilai aset mereka (Susanto, 2023). Konsekuensinya tidak hanya mencakup pencabutan izin usaha, tetapi juga penyalahgunaan izin palsu dan penambangan ilegal di kawasan hutan, yang merugikan negara hingga sekitar Rp 2,3 triliun (Maulana, 2024).

Berdasarkan data kasus yang ada saat ini, penipuan diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja dan direncanakan yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri. menurut ACFE, penipuan laporan keuangan adalah suatu praktik di mana anggota tim secara sengaja membuat kesalahan atau menghilangkan informasi penting dari laporan keuangan perusahaan (ACFE, 2022). *Fraud* merupakan upaya untuk menyesatkan para pemangku kepentingan perusahaan dengan sengaja mengubah interpretasi laporan keuangan demi kepentingan individu (Sherly, Prayogo, & Ifazah, 2024). Tindakan *Fraud* ini seringkali dilakukan secara rahasia, membuatnya sulit untuk dideteksi.

Dari kasus yang disajikan, juga terlihat bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan laporan keuangan mencerminkan integritas dari top management di

dalamnya. Teori *Upper Echelon* menyatakan bahwa keputusan strategis perusahaan dapat ditentukan dari faktor latar belakang sosioekonomi (Hambrick & Mason, 1984). Menurut *American Psychological Association* (2022), salah satu faktor sosial dan ekonomi adalah asal etnis. Pengusaha yang berkewarganegaraan asing cenderung tidak melakukan kecurangan (Haans & Oever, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik latar belakang sosioekonomi, termasuk asal etnis, dapat memengaruhi perilaku dan keputusan top management, termasuk dalam hal pembuatan laporan keuangan.

Kasus-kasus yang melibatkan perusahaan tambang di Indonesia sebagai tersangka kecurangan dalam laporan keuangan telah menyoroti pentingnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu perusahaan. Prinsip-prinsip GCG, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, menegaskan bahwa GCG adalah landasan bagi proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang berakar pada peraturan perundang-undangan dan etika bisnis. Melalui kasus-kasus tersebut, terlihat bahwa pelanggaran terhadap prinsip GCG dapat mengakibatkan tindakan yang tidak etis dalam menjalankan bisnis, seperti manipulasi *financial statement* yang bertentangan dengan fakta. Tindakan yang tidak etis tersebut bukan hanya merugikan pihak eksternal *company*, tetapi juga merugikan pihak internal *company* serta pemangku kepentingan lainnya.

Jensen dan Meckling (1976) memperkenalkan teori Agensi yang membahas mengenai hubungan agensi dalam suatu perusahaan, di mana terdapat kontrak antara prinsipal (pihak yang memberi kuasa) dan agen (pihak yang menjalankan tugas atas nama prinsipal). Konsep ini mencerminkan dinamika di mana agen cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi, terlepas dari kepentingan prinsipal, ketika keduanya berusaha memaksimalkan utilitas. Dalam konteks manajemen perusahaan, agen atau manajemen memiliki potensi untuk melakukan kecurangan demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif terhadap aktivitas manajemen perusahaan diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan tersebut, dan ini dapat dicapai melalui pelaksanaan prinsip GCG. Salah satu aspek penting dalam mekanisme GCG yaitu keberadaan dewan komisaris independen (Mahrani & Soewarno, 2018). Dewan komisaris independen, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi

kriteria yang ditetapkan oleh OJK. Keberadaan komisaris independen memungkinkan pengawasan yang lebih objektif terhadap aktivitas perusahaan karena mereka tidak terikat oleh kepentingan internal maupun eksternal tertentu. Dengan demikian, peran komisaris independen menjadi kunci dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan perusahaan.

Komite audit yaitu salah satu elemen penting dalam menjalankan fungsi pengawasan di dalam perusahaan, yang tidak beroperasi secara independen bertanggung jawab terhadap dewan komisaris. Sesuai ketentuan yang terdapat pada Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit bertanggung jawab membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi dan tugas pengawasan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ruchiatna, Midiastuty, dan Suranta (2020), komite audit dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa keberadaan komite audit yang aktif dan sering melakukan rapat dapat secara signifikan mengurangi *probability* nya terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan.

Beberapa studi sebelumnya telah menginvestigasi dampak kewarganegaraan CEO, proporsi komisaris independen, dan frekuensi rapat komite audit terhadap kecurangan dalam laporan keuangan. Namun, temuan dari penelitian tersebut menunjukkan ketidak konsistenan. Misalnya, penelitian oleh Haans dan Oever (2021) menemukan bahwa pengusaha yang berasal dari luar negeri cenderung tidak terlibat dalam kecurangan. Di sisi lain, hasil penelitian oleh Edi dan Cristi (2022) menegaskan bahwa kewarganegaraan tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan. Temuan dari penelitian Tan dan Chariri (2022) mengindikasikan bahwa proporsi komisaris independen memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, dimana hasil penelitian oleh Triyani, Kamalia, dan Azwir (2019) menunjukkan jika peran komisaris independen tidak signifikan dalam mencegah kecurangan laporan keuangan. Di sisi lain, penelitian oleh Sijabat dan Tamba (2021) menegaskan jika frekuensi rapat komite audit memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap *fraud*. Namun, penelitian oleh Larune, Harahap, Silaban, dan Putri (2021) mendapatkan hasil bahwa *fraud* laporan keuangan dipengaruhi oleh frekuensi rapat komite audit.

Dari gambaran yang telah dijelaskan, para peneliti tertarik untuk menyelidiki dampak karakteristik CEO dan pengaplikasian *Good Corporate Governance*

terhadap kejadian *fraud* dalam laporan keuangan. Adanya perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya yang saling bertentangan mendorong para peneliti untuk mengadakan studi ini. Selain itu, hingga saat ini, tidak ada penelitian yang telah menggabungkan variabel karakteristik CEO dan *Good Corporate Governance* dalam mengeksplorasi faktor yang berkontribusi terhadap *fraud* laporan keuangan di sektor pertambangan antara 2020-2022. Kajian ini dianggap penting sebagai langkah dalam menghadapi tantangan kasus kecurangan yang terus terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian ini, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah kewarganegaraan CEO berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah rapat komite audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan menjadi:

1. Menguji pengaruh kewarganegaraan CEO terhadap kecurangan laporan keuangan.
2. Menguji pengaruh proporsi komisaris independen terhadap kecurangan laporan keuangan.
3. Menguji pengaruh rapat komite audit terhadap kecurangan laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini memberikan kemajuan yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang bagaimana menerapkan Teori *Upper Echelons* dalam mengidentifikasi unsur-unsur yang menyebabkan laporan keuangan bersifat curang. Kesimpulan penelitian ini mendukung gagasan eselon atas dengan menunjukkan bagaimana kewarganegaraan CEO, persentase komisaris independen, dan rapat komite audit semuanya mempengaruhi seberapa besar kemungkinan terjadinya kecurangan. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya dengan menggunakan metodologi dan ruang lingkup lain.

1.4.1 Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini dapat memberikan panduan yang signifikan bagi bisnis dalam merumuskan peraturan tentang penunjukan CEO, susunan dewan komisaris independen, dan penjadwalan sesi komite audit. Bisnis dapat menurunkan kemungkinan penipuan dalam laporan keuangan dengan cara ini. Dengan mengadakan rapat komite audit yang lebih sering dan produktif, manajemen perusahaan juga dapat menggunakan temuan ini untuk meningkatkan pemantauan internal.

1.4.2 Manfaat Teoritis dan Akademis

Penelitian ini menguji dampak variabel terkait terhadap kecurangan laporan keuangan, yang memajukan gagasan tata kelola perusahaan yang baik. Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan dalam literatur akademis tentang dampak rapat komite audit, kewarganegaraan CEO, dan persentase komisaris independen terhadap kecurangan laporan keuangan. Manfaat teoritisnya akan meningkatkan pengetahuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik dan memberikan kerangka kerja untuk penelitian lebih lanjut, sedangkan manfaat praktisnya akan membantu praktisi bisnis meningkatkan tata kelola perusahaan dan menurunkan risiko penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

- American Psychological Association*. (2022). *APA Dictionary of Psychology*. Diambil kembali dari https://dictionary.apa.org/socioeconomic-status?_ga=2.189599211.1564383517.1671864632-658044775.1671864630
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*. (2019). *Survei Fraud Indonesia 2019*. Jakarta: *ACFE Indonesia Chapter*.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*. (2022). *Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations*. Diambil kembali dari <https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2022/>
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*. (2022). *Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations*. *Association of Certified Fraud Examiners*.
- Christian, N., & Veronica, J. (2022). Dampak Kecurangan pada Bidang Keuangan dan Nonkeuangan terhadap Jenis *Fraud* di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(1), 91-102.
- Edi, & Cristi. (2022). Pengaruh Karakteristik CEO Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1689-1703.
- Haans, F. R., & Oever, K. v. (2021). *Foreign entrepreneurs engage in less misconduct than native entrepreneurs: Evidence from U.K. director disqualifications*. *Journal of Business Venturing Insights*, 1-7. Diambil kembali dari *Journal of Business Venturing Insights*.
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. *The Academy of Management Review*, 193-206.
- Indonesia. Kementerian BUMN. (2011, Agustus 01). Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Dipetik April 28, 2024, dari <https://jdih.bumn.go.id/peraturan/PER-01-MBU-2011>
- Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. (2015, Desember 19). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit. Dipetik April 28, 2024, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/128761/peraturan-ojk-no-55-pojk042015->
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, 1(4), 305-360.
- Larune, J. A., Harahap, V. G., Silaban, I. R., & Putri, A. P. (2021). *The Effect of Number of Audit Committee Meetings, Company Size, Leverage and Managerial Ownership on Financial Reporting Fraud in Service Companies on the IDX*. *Jurnal Mantik*, 5(1), 153-159.
- Mahrani, M., & Soewarno, N. (2018). *The effect of good corporate governance mechanism and corporate social responsibility on financial performance with earnings management as mediating variable*. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 41-60.

- Maulana, I. (2024). Mongabay. Dipetik Mei 1, 2024, dari <https://www.mongabay.co.id/2024/03/29/korupsi-tambang-nikel-modus-dokter-eks-pejabat-kesdm-dituntut-5-tahun-penjara/>
- Ruchiatna, G., Madiastuty, P. P., & Suranta, E. (2020). Pengaruh karakteristik komite audit terhadap *Fraudulent financial reporting (The effect of audit committee characteristics on Fraudulent financial reporting)*. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (Jakman)*, 1(4), 255-264.
- Setiawan, N. V. (2023, Agustus 01). ESDM Akhirnya Buka Suara Soal Kasus Korupsi Blok Mandiodo. Diambil kembali dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230801174630-4-459278/esdm-akhirnya-buka-suara-soal-kasus-korupsi-blok-mandiodo>
- Sherly, Prayogo, Y., & Ifazah, L. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Financial Statement *Fraud* dengan Perspektif *Fraud* Diamond. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 808.
- Sijabat, J., & Tamba, R. A. (2021). *Empirical Study Of The Effect Of The Audit Committee Characteristics. International Journal Reglement and Society*, 2(3), 125-135.
- Soda, E. (2016). PT Timah Diduga Buat Laporan Keuangan Fiktif. Dipetik Mei 1, 2024, dari <https://www.tambang.co.id/pt-timah-diduga-membuat-laporan-keuangan-fiktif>
- Susanto, V. Y. (2023). Kasus tambang nikel ilegal, Kejati Sulawesi Tenggara sita uang Rp 790,8 miliar. Dipetik Mei 1, 2024, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/kasus-tambang-nikel-ilegal-kejati-sulawesi-tenggara-sita-uang-rp-7908-miliar>
- Tan, N. A., & Chariri, A. (2022). Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen, Aktivitas Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(4), 1-13.
- Transparency International. (2022). Corruption Perceptions Index 2022 Media Kit. Diambil kembali dari <https://www.transparency.org/en/cpi/2022/media-kit>
- Triyani, O., Kamalia, & Azwir. (2019). Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan dengan Manajemen Laba sebagai *Variabel Moderating*. *Jurnal Ekonomi*, 27(1), 27-36.
- Xie, B., Davidson, W., DaDalt, P. (2003). *Earnings management and corporate governance: the role of the board and the audit committee. Journal of Corporate Finance* 9(3), 295–316.
- Yunus, S. R. (2023, Juli 13). Kerugian Negara akibat Penambangan Ilegal di Konsesi PT Antam Konawe Utara Capai Rp 5,7 Triliun. Diambil kembali dari Kompas: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/13/penambangan-ilegal-di-konsesi-pt-antam-konut-timbulkan-kerugian-rp-57-triliun>